

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN KOTA KISARAN MENUJU KOTA MANDIRI

Ridwan Nasution, Teknik Sipil UNA

ABSTRACT

Community participation in development is a condition that is intensive driven / stimulated when we want a society willing to sacrifice the development salts. However, to encourage people to participate in the development process itself is still a problem that needs to be sought permasalahannya. In fact the approach of community participation in the City proses pembangunan range can be said is that the new results where the new momentum carried over to the democratic transition process characterized by the growth of the New Order regime.

The process of community participation in development in the City range from a requirement to be considered since defined in the Act No. 24 of 1992 on Spatial Planning. This was then followed up with the enactment of Government Regulation no. 69 of 1996 on the Implementation of the Rights and Obligations and Forms And Procedures Public Participation in Spatial Planning.

The purpose of this study was to determine mekanisme decision making in planning and design of urban infrastructure development that occurred in the City Kisaran. Dalam this research approach used is based on qualitative methods deskriptif questionnaires distributed to government officials and communities in the Western District of the City range .

The results obtained are that the preparation of the concepts of development policy is still based on the analysis of policies that berbasis on problem solving. That community participation in planning development policies have been implemented through meetings / meetings of the proposal / idea, although there are still people do not feel included. In the implementation of non-physical development, participation, cooperation, solidarity, socio-cultural, legal and education is quite good, although the funds are expected from the government.

Keywords: *community participation, urban development, sustainable city.*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis multidimensional yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini menjadikan beban pembangunan yang harus ditanggung oleh bangsa ini cukup berat. Dengan perkataan lain bahwa bangsa dan rakyat harus dituntut dapat memberikan banyak pengorbanan dalam menjalankan roda pembangunan nasional. Dari segi pemerintah, ini berarti bahwa pemerintah perlu menciptakan suatu insentif bagi masyarakat Indonesia agar mereka mau memahami permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi dan bersedia dengan sukarela mau berkorban untuk menunjang tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Peran utama dalam pembangunan disektor publik sesuai paradigma baru, bahwa pembangunan sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah secara teknokrasi yaitu bertumpu pada rasionalitas kepakaran, perlahan-lahan tetapi pasti bergulir menjadi sosio-demokrasi yaitu menekankan partisipasi masyarakat. Fungsi pemerintah di bidang pengaturan dan pembinaan pun telah terjadi perubahan diberbagai bidang. Fungsi pengaturan pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin agar hak-hak masyarakat dan aparat dapat diaktualisasikan sesuai dengan tata nilai, norma dan ketentuan legal yang berlaku, dengan adil dan sebaik-baiknya. Sedangkan fungsi pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah menjadi memfasilitasi yang memungkinkan masyarakat dan aparat untuk mengembangkan dan memberdayakan diri dengan sebaik-baiknya.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memang merupakan suatu insentif yang bersifat kondisi yang harus digerakkan/dirangsang apabila kita menginginkan masyarakat mau berkorban untuk pembangunan. Akan tetapi untuk mendorong masyarakat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri masih merupakan permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Mendorong masyarakat bukan mengharuskan partisipasi masyarakat seperti halnya mendorong masyarakat mau berkorban untuk suatu pembangunan, juga membutuhkan insentif-insentif tersendiri. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Karena pembangunan untuk rakyat, maka adalah mutlak bila rakyat harus mau berpartisipasi dalam pembangunan. Dari banyak pengalaman tentang pelaksanaan pembangunan yang dijumpai banyaknya pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki rakyat sebagai penikmat pembangunan tersebut. Disamping itu, kemunculan partisipasi masyarakat dalam membangun berkaitan pula dengan definisi yang kita gunakan dalam mengartikan konsep partisipasi.

Proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Kisaran mulai menjadi keharusan untuk diperhatikan sejak dirumuskan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang, menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang yaitu terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Pada kenyataannya pendekatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Kisaran dapat dikatakan merupakan hasil yang baru dimana

momentumnya baru terlaksana seiring dengan proses transisi demokrasi yang ditandai dengan tumbangannya rezim Orde Baru. Pada konteks makro kondisi kebangsaan yang baru beranjak keluar dari sistem birokrasi yang otoriter dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang membudaya mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat rendah diantara stake holder pembangunan menunjukkan besarnya potensi konflik yang salah satunya dapat berawal dari perbedaan persepsi tentang ganti-rugi yang partisipatif.

Percepatan pembangunan fisik kota sejauh ini tidak demikian mengembirakan ataupun sesuai dengan standard rencana misalnya acuan RUPTK. Beberapa masalah yang dapat ditelusuri adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap percepatan pembangunan yang berlangsung disamping kemungkinan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan.

1.2. Tujuan Penelitian

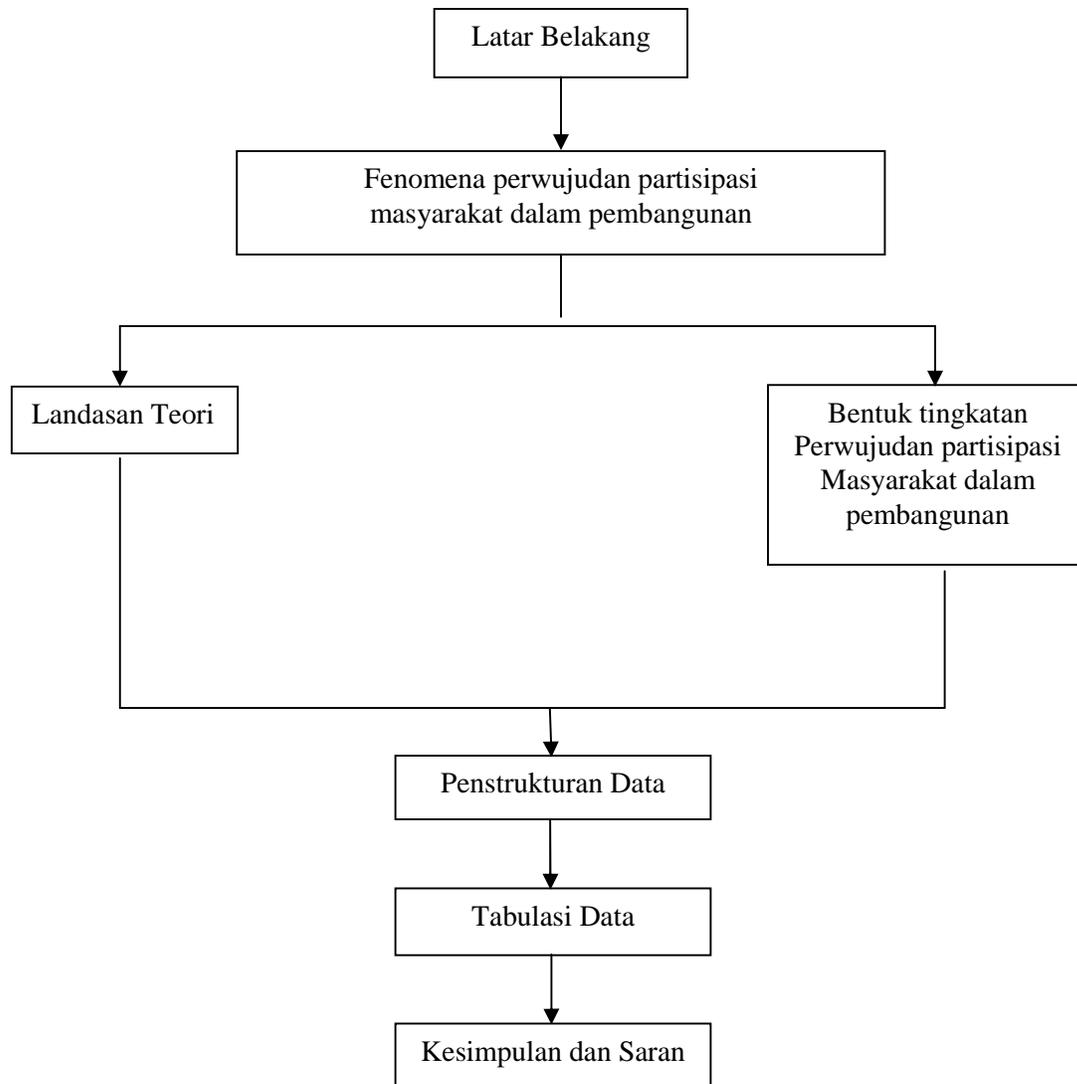
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengambilan keputusan dalam perencanaan dan perancangan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang terjadi di kota Kisaran.

1.3. Perumusan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.

1.3. Kerangka Penelitian

Untuk mengetahui sejauhmana pelibatan dalam rangka proses pembangunan sarana dan prasarana perkantoran, maka dapat digambarkan kerangka kerja sebagai berikut:



Gambar 1.1. Kerangka Penelitian

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Partisipasi adalah sebuah konsep yang problematik dan telah lama menjadi bahan kajian, dari berbagai banyak pendapat, bahan kajian serta buku pandoman yang membahas mengenai partisipasi masyarakat menunjukkan tafsiran yang sangat beragam mengenai partisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memang merupakan suatu insentif yang bersifat kondisi yang harus digerakan/ dirangsang apabila kita menginginkan masyarakat

mau berkorban untuk pembangunan. Akan tetapi untuk mendorong masyarakat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri masih merupakan permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Mendorong masyarakat mau berkorban untuk suatu pembangunan, juga membutuhkan intensif-intensif tersendiri. Kita tidak boleh mengatakan bahwa karena pembangunan untuk rakyat, maka adalah mutlak bila rakyat harus mau berpartisipasi dalam pembangunan. Dari banyak pengalaman tentang pelaksanaan pembangunan yang dijumpai banyaknya pembangunan yang dikatakan untuk kepentingan rakyat ternyata kenyataanya tidak

sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki rakyat sebagai penikmat pembangunan tersebut. Di samping itu, kemunculan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkaitan pula dengan definisi yang kita gunakan dalam mengartikan pula dengan definisi yang kita gunakan dalam mengartikan konsep partisipasi.

Peran utama dalam pembangunan disektor publik sesuai paradigma baru, bahwa pembangunan yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah secara Teknokrasi yaitu bertumpuh pada rasionalitas kepakaran, perlahan-lahan tetapi pasti bergulir menjadi sosio-demokrasi yaitu menekankan partisipasi masyarakat. Fungsi pemerintah di bidang pengaturan dan pembinaan pun telah terjadi perubahan diberbagai bidang. Fungsi pengaturan pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin agar hak-hak masyarakat dan aparat dapat diaktualisasikan sesuai dengan tata nilai, norma dan ketentuan legal yang berlaku, dengan adil dan sebaik-baiknya. Sedangkan fungsi pembinaan yang dilaksanakan oleh pemerintah menjadi memfasilitasi yang memungkinkan masyarakat dan aparat untuk mengembangkan dan memberdayakan diri dengan sebaik-baiknya.

2.2. Pengertian Partisipasi

Sastropoetro (1988: 13) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang didalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan oleh Allport dalam Sastropoetro (1988: 12) yang menyatakan bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih daripada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja.

Selain itu, Sastropoetro (1988: 39) juga mengemukakan pendapat bahwa partisipasi adalah keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Pengertian partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ataupun didalam menerima kemali hasil pembangunan.

Partisipasi adalah keterlibatan penduduk setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pembangunan proyek atau pelaksanaannya.

Selanjutnya Panudju (1999: 69) mendefinisikan partisipasi masyarakat merupakan istilah pengkatagorian dari kekuatan masyarakat. Hal ini merupakan pendistribusian kembali dari kekuatan/kekuasaan yang memungkinkan tidak dimiliki masyarakat, pada masa sekarang diluar proses politik dan ekonomi untuk mencapai tujuan dimasa depan.

2.3 Bentuk Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Dalam rumusannya mengenai konsep partisipasi Sastropoetro (1988: 16) juga merumuskan bentuk-bentuk partisipasi yang terdiri dari:

1. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
2. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
3. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada diluar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga).
4. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komunitas (biasanya diputuskan oleh rapat komunitas a.l. rapat desa yang menentukan anggarannya).
5. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
6. Aksi massa.
7. Mangadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri.
8. Membangun proyek komunitas yang bersifat otonom.

Sedangkan mengenai jenis-jenis partisipasi menurut (Sastropoetro, 1988: 16) adalah :

1. Pikiran (*psychological participation*)
2. Tenaga (*physical participation*)
3. Pikiran dan Tenaga (*psychological participation dan physical participation*)
4. Keahlian (*participation with skill*)
5. Barang (*material participation*)
6. Uang (*money participation*)

Bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat penerima program pembangunan, menurut Cohen dan Uphoff dalam Supriatna (2000: 212) terdiri dari partisipasi dalam

pengambilan keputusan, implementasi, pemanfaatan masyarakat penerima program perlu dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses perencanaan program pembangunan.

Meskipun masalah peran serta masyarakat telah banyak dibicarakan, yang sering kali menjadi pertanyaan adalah seberapa jauh tingkat peran serta masyarakat diperlukan agar usaha tersebut dapat berhasil dengan baik. Hal ini perlu dipikirkan dengan baik karena pada kenyataannya terdapat berbagai macam dan tingkat partisipasi masyarakat yang tidak mudah diklasifikasikan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pembahasan Partisipasi Masyarakat Dalam pembangunan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka kajian ini dilakukan dengan pendekatan aspek kerjasama, kebersamaan dan keikhlasan.

3.1.1. Partisipasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan

a. Dalam proses identifikasi masalah.

Pada dasarnya, asas kebersamaan telah diterapkan di Kecamatan Kota Kisaran Barat, baik di lingkungan internal maupun eksternal dengan intansi lain, dengan indikasi:

1. Adanya dialog-dialog dengan semua personil dan rapat staf Kecamatan Kota Kisaran Barat, dan monitoring melalui rapat Kelurahan secara rutin (1 x 1 minggu) atau dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila Camat akan memutuskan hal-hal yang prinsipil dan adanya hal-hal yang mendesak (*emergency*).
2. Adanya rapat koordinasi antar unit kerja Kecamatan untuk membahas masalah-masalah dikecamatan dan melakukan rapat koordinasi dengan intansi terkait untuk memecahkan masalah yang kompleks.
3. Terbentuknya tim kerja antar unit kerja kecamatan untuk melaksanakan kegiatan pada lingkungan kerja dinas-dinas dan dibentuknya tim kerja antar intansi untuk melaksanakan kegiatan yang kompleks dan harus ditempuh secara terpadu oleh beberapa intansi, juga merupakan indikasi bentuk

kerjasama ini. Hanya saja bagaimana kinerja tim di lapangan perlu evaluasi secara berkesinambungan.

Akan tetapi dari hasil penelitian di lapangan sebagaimana telah diuraikan pada tabel 4.11 sebelumnya, bahwa dalam proses identifikasi masalah seluruh responden aparat pemerintah Kecamatan Kota Kisaran Barat dan Lurah se kecamatan Kota Kisaran Barat mengatakan selalu mengikut sertakan masyarakat. Sebaliknya responden masyarakat hanya 79% yang mengatakan masyarakat diikutsertakan. Jadi ada 21% responden yang berpendapat masyarakat tidak diikut sertakan. Dari kenyataan ini, maka terlihat adanya perbedaan pendapat/pandangan dilapangan antara aparat dan masyarakat.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang belum puas atau belum tertampung aspirasinya untuk mengajukan usul di dalam rapat-rapat atau pertemuan dengan aparat terutama dalam rangka perumusan/formulasi kebijakan publik.

Menurut pendapat responden golongan masyarakat dari segi usia, pendidikan dan pekerjaan yang di ikut-sertakan dalam proses identifikasi dan usulan masalah dapat dilihat pada tabel 4.14.

Dari segi usia dan pendidikan terlihat dari tabel 4.14, bahwa terbanyak dari golongan masyarakat berusia 41-55 tahun yakni 69% responden diikuti dengan pendapat 25% responden yakni dari masyarakat yang berusia 55 tahun. Pendapat responden tentang pendidikan masyarakat yang di ikut sertakan ini adalah 71% berpendidikan sarjana dan 25% berpendidikan Diploma. Pendapat responden tentang pekerjaan masyarakat yang di ikut sertakan dalam proses usulan ini adalah PNS 49% dan 385 dari kalangan swasta.

Dari segi usia dan pendidikan masyarakat yang ikut serta dalam pengusulan masalah telah memadai. Akan tetapi bila dikaitkan dengan jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian/pekerjaan, maka jelas perimbangan masyarakat yang ikut serta dalam proses usulan masalah pembangunan ini kurang seimbang dan kurang mewakili seluruh lapisan masyarakat, sebab pekerjaan penduduk yang terbanyak adalah dari kalangan swasta dan pedagang yakni

32,37%+40,62%=72,99% , sedangkan PNS hanya 16%.

Sehubungan dengan itu maka permasalahan pasar/pajak yang tidak teratur, peternak yang tidak disiplin serta masalah yang lainnya dapat diidentifikasi untuk dirumuskan selanjutnya guna mencari pemecahan masalah pembangunan.

Bila dikaitkan dengan aspek kebersamaan dan paradigma pembangunan, maka sebaiknya masyarakat selalu diikuti sertakan dalam setiap kegiatan pengidentifikasi masalah kebijakan, sebab masyarakat adalah subjek sekaligus objek dari pembangunan itu sendiri, masalahnya apakah ketidak-seimbangan keikutsertaan masyarakat dalam ini adalah karena kurang sadarnya masyarakat akan peran sertanya dalam pembangunan atau kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kecamatan, kelurahan ataupun kepling? Hal ini membutuhkan transparansi dan kesadaran seluruh komponen pembangunan, baik pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Sedangkan dari kajian transparansi dalam rangka *good governace*, maka seluruh aspirasi masyarakat perlu ditampung untuk mengetahui permasalahan dimasyarakat, sehingga dalam merumuskan masalah dan akhirnya memformulasikan strategi kebijakan benar-benar tepat, akurat, sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat.

b. Dalam perumusan masalah kebijakan

Dalam proses merumuskan masalah, maka juga terdapat perbedaan pendapat dan pandangan antara responden aparat pemerintah dan masyarakat. Menurut data hasil penelitian terhadap responden pemerintahan Kecamatan Kota Kisaran Barat dan lurah se-Kecamatan Kota Kisaran Barat seluruhnya mengatakan mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat dalam rapat/pertemuan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Akan tetapi menurut responden masyarakat 33% yang mengatakan sama dengan aparat, tetapi lebih banyak yakni 67% mengatakan tidak mengikutsertakan masyarakat didalam merumuskan masalah kebijakan.

Kota Sama dengan mengidentifikasi masalah, menurut responden berbagai lapisan masyarakat menurut usia lebih banyak dari usia 41-55 tahun yakni 70% responden dan 26%

berpendapat dari usia diatas 55 tahun. Kemudian menurut semua responden bahwa masyarakat yang berpendidikan SLTP baik dalam identifikasi masalah dan merumuskan masalah kebijakan pembangunan sama sekali tidak diikutsertakan. Sedangkan tingkat Diploma ada 25% responden mengatakan keikutsertaan, dan kebanyakan responden yakni 73% mengatakan masyarakat yang berpendidikan sarjana dan pascasarjana.

Pekerjaan masyarakat yang berpartisipasi dalam merumuskan masalah juga terbanyak dari PNS yakni 50% responden berpendapat demikian 39% responden mengatakan dari kalangan swasta. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada ketidak-seimbangan golongan penduduk berdasarkan pekerjaan yang lebih banyak dari kaum swasta yakni 72.99% PNS 165.

Perbedaan pandangan ini dan juga perbedaan yang ada pada uraian bagian (a) diatas menunjukkan masih kurang eratnya hubungan antar pemerintah kecamatan dan kelurahan dengan masyarakat terutama bila dikaitkan dengan asas kebersamaan, kerja sama dan kerelaan masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.

Bila dikaitkan dengan kajian paradigma pembagian sebagai mana telah diuraikan dengan kajian pada tinjauan pustaka sebelumnya, maka hal ini akan berdampak semakin berkurangnya partisipasi masyarakat di bidang pembangunan dalam aplikasi yang telah dan akan diterapkan nantinya. Hal ini mengingatkan bahwa masyarakat kurang diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pengajuan usul apalagi perumusan masalah kebijakan.

Berkenaan dengan itu kenyataan ini juga masih menunjukkan pola pemerintahan yang lama yang cenderung sentralistis untuk itulah perlu dirubah dengan pola paradigm baru pembangunan dan manajemen stratejik serta pengelolaan kebijakan yang menunjukkan administrasi publik modern sebagai mana telah penulis kemukakan sebelumnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisa pada bab sebelumnya, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sekaligus

merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa penyusunan konsep-konsep kebijakan strategis di bidang pembangunan masih belum di susun berdasarkan analisis kebijakan yang berbasis pada pemecahan masalah. Kendala yang di temukan dalam hal ini antara lain adalah di satu sisi: kompetensi aparat pemerintah Kecamatan Kota Kisaran Barat yang belum memadai terutama pada paradigma baru yakni pemahaman, penjabaran dan aktualisasi paradigma pembangunan, manajemen strategi dan pengelolaan proses kebijakan publik. Di sisi lain, keputusan strategi kebijakan publik berada pada Pemerintah Kota. Kendala lainnya adalah kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung administrasi publik monidren serta sistem mutasi pegawai yang tidak berbasis kompetensi.
2. Bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam tahapan proses identifikasi/usul masalah dan perumusan masalah, partisipasi kerjasama dan kebersamaan masyarakat telah dilaksanakan melalui rapat/pertemuan berupa usul/pemikiran, walaupun masih ada masyarakat yang merasa belum diikuti sertakan. Hal ini menunjukkan kekurangan eratan hubungan aparat dengan masyarakat. Sebenarnya pada tahapan ini, partisipasi masyarakat dari sisi pikiran sangat di perlukan untuk mengetahui masalah-masalah di dalam masyarakat serta kebutuhan masyarakat sehingga dapat dirumuskan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.
 - b. Dalam proses memprakirakan, merekomendasi aksi kebijakan dan merumuskan serta formulasi kebijakan, partisipasi masyarakat tidak diperlukan sebab hal ini adalah kewenangan pemerintah.
3. Bahwa pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan/aplikasi kebijakan pembangunan ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yakni kerjasama di bidang gotong-royong kebersihan lingkungan berupa tenaga, pemeliharaan, dukungan, dan pemikiran sebagai perwujudan SK Bupati No. 141/661/K/2001 sudah dilakukan, akan tetapi masih belum maksimal. Sedangkan aspek kebersamaan masyarakat yang telah baik terlihat dari pembangunan atau pembersihan rumah ibadah, sarana olah raga dan pos keamanan, walaupun dari segi penyediaan dana masih sangat kurang.
- b. Dalam hal pelaksanaan pembangunan non fisik, partisipasi kerjasama, kebersamaan dan kerelaan masyarakat pada kegiatan penyuluhan di bidang keagamaan, sosial-budaya, hukum dan pendidikan cukup baik, walaupun dananya masih di harapkan dari pihak pemerintah. Khusus dalam hal ini kerelaan pembayaran PBB, partisipasi masyarakat sudah terlaksana akan tetapi belum maksimal.

4.2. Saran

Dari kesimpulan di atas perlu beberapa saran untuk untuk menindaklanjuti hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hendaknya keikutsertaan masyarakat di dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring memperhatikan perimbangan jumlah penduduk menurut lapisan usia, pendidikan dan pekerjaannya, sehingga seluruh aspirasi dapat tertampung dan terwakili.
2. Potensi kebersamaan yang cukup menonjol sebagai wujud partisipasi masyarakat bahkan harus dipelihara dan ditingkatkan untuk mendorong kualitas kerjasama, kerelaan masyarakat dalam seluruh proses kebijakan pembangunan di wilayah Kecamatan Kota Kisaran Barat.
3. Untuk menciptakan kondisi kehidupan lebih baik, dalam era desentralisasi, pemerintah pusat maupun daerah menghadapi berbagai tantangan yaitu dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan fasilitas perkotaan yang semakin baik sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam rangka

meningkatkan citra kota. Sedang di sisi lain kemampuan pemerintah daerah pada saat ini pada umumnya masih terbatas. Seiring dengan kemajuan dan kemandirian daerah otonom.

Sehubungan dengan kondisi hal tersebut Forum Perkotaan diharapkan dapat membantu dan menjembatani menjadi medaiator para Stake holder (Stake, Society, Private Sector). Agar para stake holder mendapat suatu kemufakatan untuk menyepakati penyelenggaraan program kebijakan dan manajemen kota yang pada dasarnya berintikan upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan kota yang bersih dan beriwibawa sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan sekaligus menyusun strategi pembangunan kota berdasarkan peran aktif warga kota. Yang memuat sekurang-kurangnya aspek prioritas:

1. Pembangunan ekonomi perkotaan, dengan sasaran penamggulangan kemiskinan kota.
2. Pembangunan sarana dan prasarana perkotaan.
3. Pembangunan sosial termasuk upaya mewujudkan keamanan kota.
4. Pembangunan peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan kota.
5. Pembangunan kualitas lingkungan hidup kota.
6. Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander (2002) *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukasi.
- Beratha, I Nyoman (1991) *Pembangunan desa Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Conyers, Diana (ed.) (1991) *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Gajah Mada.
- Fauzi, N dkk (2001) *Otonomi Daerah Sumberdaya Alam Lingkungan*. WAHLI YAPPIKA Yogyakarta : Pustaka Utama.
- Hubeis, A.V.S, Tjitropranoto P. dan Ruwiyanto W (1993) *Penyuluhan Pembangunan Indonesia Menyongsong Abad XXI*. Jakarta: PT.Pustaka Pembangunan swadaya Nusantara.
- Kasianto, M.J. (1991) *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*. Jakarta :PT. Pembangunan Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- Koentjaningrat (1974) *Kebudayaan Mentalitet dan Pembagunan*. Jakarta:PT.Gramedia.
- Koentjaningrat (1984) *Masalah-masalah Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Kristiadi, J.B.dkk (1998) *Pemberdayaan Birokrasi dalam Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Lubis, M.Solly (1996) *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lowa, Anton dkk (1985) *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali
- Mikkelsen, Britha (2003) *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moeljarto (1987) *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Mubyarto (2000) *Pemilihan Ekonomi Rakyat Menuju Kemandirian Masyarakat Desa*, Jakarta: Aditiya Media.
- Muhaimin, Yahya A. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dkk (1987) *Menatap Masalah Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kajian Masyarakat Indonesia.
- Ndara, Taliziduhu (1990) *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Moh (1999) *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia.

- Panudju, Bambang (1999) *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran Serta masyarakat berpenghasilan rendah*. Bandung: Alumni Bandung.
- Sarundajang, S.H (1997) *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Sastropetro, R.A. Santoso (1998) *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Siagian, H (1983) *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Alumni.
- Soetrino, Loekman (1995) *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Stainberg, Florian, Nana Rukmana D.W. dkk (1993) *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: LP3ES.
- Sumarto, Sj Hetifah (2003) *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumodiningrat, Gunawan (1999) *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Susanto, Astrid S (1977) *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- Siagian, Sondang P (1998) *Proses Pengolahan Pembangunan Nasional*. Jakarta: CV.Haji Masagung.
- Surjadi (1995) *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Supriatna, Tjahya (2000) *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro (1987) *Perencanaan Pembangunan*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Tjokroamijoyo, Bintoro (1995) *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.